

Selat Hormuz dan Cermin Kedaulatan Indonesia di Tengah Krisis 2026

suryawiranto.id

Konflik di Selat Hormuz bukan lagi sekadar ketegangan regional antara Iran dan poros Barat. Ia telah menjadi laboratorium geopolitik kontemporer yang menguji fondasi perang hibrida abad ke-21 secara paling brutal. Sejak serangan gabungan AS-Israel pada 28 Februari 2026 yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei, Iran merespons dengan deklarasi efektif penutupan Selat Hormuz—choke point yang mengangkut sekitar seperlima pasokan minyak dan LNG global. Lebih dari sebulan kemudian, meski ada upaya gencatan senjata sementara dua minggu yang rapuh yang dimediasi Pakistan dan didorong China, lalu lintas kapal masih sangat terbatas, serangan terhadap puluhan kapal dagang terus terjadi, dan ancaman ranjau laut serta serangan asimetris tetap membayangi. Harga minyak melonjak tajam, rantai pasok energi global terguncang, dan dampaknya merembet hingga ke inflasi serta perlambatan pertumbuhan di berbagai negara importir.

Bagi Indonesia, peristiwa ini bukan tontonan jauh di Teluk Persia. Ia adalah cermin yang tak kenal ampun, yang memantulkan kerentanan struktural kita sendiri dalam lanskap multipolar yang semakin kejam dan tak kenal kompromi.

Energi: Amunisi Strategis yang Tak Terlihat

Gangguan di Selat Hormuz—dari penurunan drastis lalu lintas kapal hingga serangan selektif terhadap kapal “musuh”—bukan sekadar fluktuasi pasar. Ia merupakan senjata geopolitik sistemik yang telah membuktikan diri sebagai salah satu disruptor pasokan energi terbesar dalam sejarah modern. Harga energi global melonjak, biaya pengiriman melambung, dan negara-negara importir seperti Indonesia langsung merasakan tekanan inflasi yang merembet ke sektor pupuk, transportasi, petrokimia, dan industri manufaktur.

Indonesia, yang masih bergantung signifikan pada impor energi meski memiliki cadangan domestik, berada dalam posisi paradoks: secara geografis berada di luar zona konflik langsung, tetapi secara ekonomi terikat erat pada kerapuhan rantai pasok global. Ketahanan energi belum diangkat sepenuhnya sebagai doktrin strategis nasional. Padahal, dalam realitas geopolitik hari ini, energi bukan lagi komoditas biasa—ia adalah amunisi utama perang hibrida. Negara yang gagal menguasai kedaulatan energinya sendiri sesungguhnya sedang menyerahkan sebagian kedaulatannya kepada dinamika yang tak sepenuhnya ia kendalikan.

Choke Point dan Ilusi Jarak Geografis

Jika Hormuz adalah urat nadi energi global, maka Indonesia memiliki analogi yang jauh lebih strategis: Selat Malaka dan jalur ALKI (Alur Laut Kepulauan Indonesia). Kedua lintasan ini bukan sekadar koridor perdagangan, melainkan simpul kekuasaan maritim yang potensial menjadi titik tekan dalam konflik Indo-Pasifik yang semakin membesar. Sejarah geopolitik mengajarkan pelajaran keras: siapa yang menguasai choke point, ia menguasai aliran kekuatan—baik minyak, LNG, data, maupun narasi.

Di sini Indonesia menghadapi paradoks tragis. Secara geografis, kita adalah negara maritim terbesar dengan posisi yang menentukan. Namun secara doktrinal dan operasional, kita masih terjebak dalam ilusi “jarak aman”. Padahal, dalam era perang proksi, gangguan rantai pasok, dan ancaman asimetris, posisi kita justru menjadikan Indonesia target potensial—bukan karena pilihan politik, melainkan karena letak geografis yang tak bisa dinegosiasikan. Krisis Hormuz 2026 menjadi pengingat tajam: tidak ada negara yang benar-benar netral ketika jalur energi dunia tersumbat, apalagi ketika ancaman serupa bisa merembet ke Selat Malaka melalui dinamika aliansi dan proksi.

Perang yang Telah Berubah Wajah: Dari Konvensional ke Asimetris-Sistemik

Krisis Hormuz menegaskan satu tesis yang tak terbantahkan: perang modern bukan lagi soal kapal induk dan divisi tank semata, melainkan kombinasi mematikan antara teknologi murah-berdaya-hancur-tinggi (drone swarming), rudal presisi berbiaya rendah, serangan siber senyap, penyebaran ranjau laut, serta perang narasi yang membentuk persepsi global. Iran, meski mengalami degradasi signifikan dalam kapabilitas konvensional, mampu menggunakan kontrol choke point sebagai leverage diplomasi paksa dan instrumen bargaining yang efektif—bahkan di tengah ultimatum dan ancaman serangan infrastruktur dari pihak lawan.

Ini adalah pelajaran doktoral bagi Indonesia. Dalam kerangka Sishankamrata (Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta), kita harus melakukan reinterpretasi radikal. Pertahanan rakyat semesta tidak boleh lagi dimaknai sempit sebagai mobilisasi fisik massa, melainkan harus berevolusi menjadi pertahanan sistemik terintegrasi: menggabungkan domain militer, ekonomi, teknologi, siber, energi, dan informasi. Keunggulan tidak lagi diukur dari jumlah arsenal konvensional yang mahal, melainkan dari ketangguhan resiliensi sistemik di tengah disrupsi hibrida yang berkepanjangan.

Kedaulatan dalam Dimensi yang Lebih Dalam

Kedaulatan negara abad ke-21 bukan lagi sekadar garis batas wilayah di peta. Ia mencakup empat pilar yang saling terkait dan saling memperkuat: kedaulatan energi, kedaulatan data, kedaulatan laut, dan kedaulatan narasi. Ketika salah satu pilar rapuh—seperti ketergantungan impor energi kita yang masih signifikan—maka seluruh bangunan kedaulatan ikut tergerus secara bertahap.

Krisis Hormuz membuktikan bahwa negara tak perlu diserang secara fisik untuk dilemahkan; cukup dengan mengganggu rantai pasok, sistem keuangan, atau opini publik global. Dalam konteks ini, ketahanan nasional bukan lagi konsep filosofis, melainkan kebutuhan operasional yang mendesak. Indonesia harus menyadari bahwa di era perang sistem, kelemahan domestik adalah undangan terbuka bagi pengaruh eksternal—baik yang terbuka maupun terselubung.

Arah Antisipasi: Dari Postur Reaktif Menuju Strategi Proaktif

Indonesia tak boleh lagi menjadi penonton pasif yang bereaksi setelah krisis global menyentuh pantai kita. Diperlukan lompatan strategis yang terukur, berbasis bukti, dan berorientasi jangka panjang:

Pertama, percepatan kedaulatan energi melalui diversifikasi agresif—bukan sekadar penambahan cadangan strategis, melainkan akselerasi transisi ke energi terbarukan yang terintegrasi dengan pertahanan (renewable microgrids untuk basis militer dan infrastruktur kritis) serta penguatan produksi domestik minyak, gas, dan biofuel.

Kedua, pembangunan pertahanan maritim berlapis berbasis teknologi di Selat Malaka dan ALKI: integrated maritime domain awareness berbasis AI, drone surveillance berkelanjutan, serta kapabilitas respons cepat yang mampu mendeteksi dan menetralkan ancaman asimetris, termasuk ranjau dan serangan swarm.

Ketiga, pengembangan kapabilitas asimetris sebagai pengganda kekuatan—unggul dalam drone swarm, cyber resilience, dan kecerdasan buatan sebagai instrumen deterrence kredibel, bukan mengejar superioritas konvensional yang mahal dan rentan.

Keempat, fortifikasi ketahanan sosial-informasi untuk menghadapi perang narasi yang kini menjadi dimensi kelima pertempuran, termasuk penguatan narasi nasional di forum internasional.

Langkah-langkah ini bukan opsi kebijakan biasa, melainkan imperatif eksistensial jika kita ingin tetap menjadi subjek—bukan objek—dalam dinamika Indo-Pasifik yang semakin volatile.

Penutup: Membaca Tanda Zaman dengan Jernih

Selat Hormuz 2026 bukan sekadar lokasi konflik sementara. Ia adalah metafor perubahan zaman: di mana ketahanan sistemik, bukan sekadar kekuatan militer konvensional, yang menentukan kelangsungan sebuah bangsa. Di sana kita melihat bagaimana sebuah negara menjadikan kerentanan geografis sebagai senjata leverage, sementara negara lain—termasuk kita—masih bergulat dengan ilusi kenyamanan dan jarak aman.

Indonesia kini dihadapkan pada pilihan historis: menjadi aktor strategis yang sadar, adaptif, dan siap, atau menjadi korban berikutnya dari dinamika global yang tak terhindarkan. Dalam bahasa kenegarawanan yang lugas:

Negara yang gagal belajar dari konflik orang lain sedang dengan sengaja menyiapkan dirinya sebagai korban berikutnya.

Waktunya bukan lagi untuk retorika, melainkan untuk tindakan doktrinal yang berani dan visioner. Sebab, di abad yang penuh ketidakpastian ini, kedaulatan bukanlah warisan yang diterima begitu saja—melainkan prestasi yang harus direbut dan dipertahankan setiap hari melalui strategi yang cerdas dan komprehensif.